

Genealogi Sekularisme Islam di Indonesia (1920–1945): Kontinuitas dan Perubahan Wacana

Indrawati¹

¹ STID Al-Hadid Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: Indrawati210275@gmail.com

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
22 February 2024	23 September 2024	1 January 2025	31 January 2025

Abstract

This research examines the genealogy of Islamic secularism in Indonesia in the period 1920–1945 with a focus on the background of the emergence, changes, and continuity of the discourse. This study uses Karl Mannheim's sociology of knowledge approach to trace the origins of Islamic secularist thought and Michel Foucault's archaeology of knowledge to analyze the dynamics of continuity and discontinuity of discourse over time. The results show that the discourse of Islamic secularism developed in three main periods. First, in the 1920s, the discourse of Islamic secularism began to emerge through Javanese nationalism. Second, in the period from 1930 to early 1945, nationalism developed by emphasizing love and willingness to make sacrifices for the country. Third, in 1945, the discourse of Islamic secularism grew stronger along with the establishment of the nation state and Pancasila as the basis of the state. This study shows a continuity in Islamic secularism in the form of a separation between politics and religion (Islam), as well as changes in the form of discourse that developed in each period. This finding contributes to the study of Islamic thought in Indonesia by highlighting the dynamics of secularism discourse in a broader socio-political context.

Keywords: Islamic Secularism, Discourse Genealogy, Nationalism, Sociology of Knowledge, History of Islamic Thought in Indonesia.

How to cite: Indrawati. (2025). Genealogi Sekularisme Islam di Indonesia (1920–1945): Kontinuitas dan Perubahan Wacana. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 34(1), 79–98. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v34i1.2088>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Diskursus sekularisme Islam di Indonesia merupakan bagian dari dinamika intelektual yang berkembang dalam konteks modernisasi dan perjumpaan antara Islam dan kolonialisme.¹ Sejak awal abad ke-20, wacana sekularisme Islam di Indonesia mengalami transformasi yang dipengaruhi oleh pemikiran reformis Islam, nasionalisme, dan interaksi dengan ide-ide sekular yang berkembang di dunia Islam maupun di Barat.² Periode 1920–1945 menjadi fase penting dalam perkembangan wacana ini, di mana berbagai pemikir dan organisasi Islam mulai merumuskan gagasan tentang hubungan antara agama dan negara dalam kerangka keindonesiaan yang sedang terbentuk.³

Secara historis, sekularisme dalam Islam tidak dapat dipahami secara monolitik. Di Indonesia, gagasan ini berkembang dalam ketegangan antara tradisionalisme, modernisme, dan pengaruh kolonial. Pemikiran tokoh-tokoh seperti Soekarno, Agus Salim, dan Natsir, serta perdebatan di kalangan organisasi Islam seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (Persis), menunjukkan bahwa konsep sekularisme Islam memiliki spektrum pemaknaan yang luas.⁴ Di satu sisi, terdapat wacana yang menolak pemisahan total antara agama dan negara, tetapi di sisi lain, ada pula yang mengadvokasi peran agama dalam negara dalam bentuk yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap modernitas.⁵

¹ Luthfi Assyaukanie, *Islam and the Secular State in Indonesia* (Institute of Southeast Asian Studies, 2009); R.E. Elson, "Nationalism, Islam, 'Secularism' and the State in Contemporary Indonesia," *Australian Journal of International Affairs* 64, no. 3 (June 1, 2010): 328–43, <https://doi.org/10.1080/10357711003736493>.

² Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia* (University of Hawaii Press, 2008); Imam Sutomo and Budihardjo Budihardjo, "The Rejection of Religious Nationalism towards the Secular State and the Islamic Caliphate: Indonesian Religious Figures Perspective," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 1 (June 21, 2021): 115–37, <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i1.115-137>.

³ Michel Picard and Rémy Madinier, *The Politics of Religion in Indonesia: Syncretism, Orthodoxy, and Religious Contention in Java and Bali* (Routledge, 2011).

⁴ Greg Barton, "Indonesia: Legitimacy, Secular Democracy, and Islam," *Politics & Policy* 38, no. 3 (2010): 471–96, <https://doi.org/10.1111/j.1747-1346.2010.00244.x>; Justus M. Van Der Kroef, "The Role of Islam in Indonesian Nationalism and Politics," *Western Political Quarterly* 11, no. 1 (March 1, 1958): 33–54, <https://doi.org/10.1177/106591295801100103>.

⁵ Myengkyo Seo, "Defining 'Religious' in Indonesia: Toward Neither an Islamic nor a Secular State," *Citizenship Studies* 16, no. 8 (December 1, 2012): 1045–58,

Periode 1920–1945 juga ditandai dengan transformasi sosial-politik yang berpengaruh terhadap perkembangan sekularisme Islam. Di tengah pergolakan politik kolonial, pergerakan nasional, dan kebangkitan kesadaran keislaman, muncul perdebatan mengenai relevansi hukum Islam dalam tata kelola negara. Wacana sekularisme Islam yang berkembang pada masa ini tidak hanya berkaitan dengan gagasan tentang pemisahan agama dan negara, tetapi juga dengan cara umat Islam merespons tantangan modernitas dan kolonialisme.⁶

Perdebatan mengenai sekularisme Islam di Indonesia pada periode 1920–1945 merupakan bagian dari dinamika intelektual yang lebih luas dalam sejarah politik Islam di tanah air. Pemikiran sekularisme muncul seiring dengan pengaruh modernisme Islam, kolonialisme, dan kebangkitan nasionalisme. Dalam konteks ini, berbagai organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Sarekat Islam memainkan peran penting dalam merespons gagasan sekularisme, baik dengan menerima unsur-unsur modernisasi maupun menolaknya. Studi oleh Noer (1973)⁷ dan Azra (2004)⁸ menunjukkan bagaimana gerakan reformis Islam mengakomodasi ide-ide sekularisme dalam batas tertentu, sementara studi oleh Laffan (2003) menyoroti bagaimana nasionalisme Islam berkembang sebagai respons terhadap wacana sekuler yang diperkenalkan oleh kolonialisme Belanda.⁹

Lebih lanjut, ketegangan antara Islam dan sekularisme juga tampak dalam kebijakan politik dan kebangsaan pada masa awal kemerdekaan. Boland (1982) membahas bagaimana pemerintah kolonial dan pemimpin nasional awal mencoba merumuskan posisi Islam dalam negara modern, sering kali dengan pendekatan sekuler yang mendapat tantangan dari kelompok Islam konservatif. Van Bruinessen (2002) menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk memisahkan agama dan politik,

<https://doi.org/10.1080/13621025.2012.735028>; Donald Porter, *Managing Politics and Islam in Indonesia* (London: Routledge, 2002), <https://doi.org/10.4324/9780203642764>.

⁶ François Raillon, “The Return of Pancasila: Secular vs. Islamic Norms, Another Look at the Struggle for State Dominance in Indonesia,” in *The Politics of Religion in Indonesia* (Routledge, 2011); R. William Liddle, “The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation,” *The Journal of Asian Studies* 55, no. 3 (August 1996): 613–34, <https://doi.org/10.2307/2646448>.

⁷ Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942* (Oxford University Press, 1973).

⁸ Azyumardi Azra, *Jaringan ulama: Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII & XVIII: akar pembaruan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004).

⁹ Michael Francis Laffan, *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma Below the Winds* (London: Routledge, 2003), <https://doi.org/10.4324/9780203222577>.

sekularisme di Indonesia tetap memiliki corak khas yang berbeda dengan model Barat.¹⁰ Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan dalam wacana sekularisme Islam di Indonesia selama periode ini, kontinuitas dalam perdebatan dan adaptasi ide-ide sekular tetap menjadi bagian integral dari sejarah intelektual Islam di Indonesia.

Dengan memahami genealogi sekularisme Islam dalam rentang 1920–1945, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kontinuitas dan perubahan wacana sekularisme Islam di Indonesia. Studi ini berupaya menelusuri bagaimana gagasan sekularisme Islam dikonstruksi, diadaptasi, dan dikontekstualisasi dalam diskursus intelektual dan politik, serta bagaimana warisan pemikiran dari periode ini memengaruhi perdebatan sekularisme Islam di era kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman sejarah intelektual Islam di Indonesia, tetapi juga memberikan wawasan tentang dinamika hubungan antara agama dan negara dalam perspektif yang lebih luas.

METODE

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kepustakaan yang berbasis pada literatur dan bahan pustaka, baik primer maupun sekunder.¹¹ Sumber primer yang digunakan mencakup surat kabar dan artikel yang diterbitkan pada periode 1930–1945, sedangkan data sekunder terdiri dari buku dan artikel yang mengulas dinamika perdebatan antara pihak nasionalis dan Islamis.¹² Wacana nasionalisme dan Islam dalam penelitian ini dikaji dengan perspektif arkeologi pengetahuan sebagaimana dikembangkan oleh Michel Foucault. Dalam "Archaeology of Knowledge", Foucault menegaskan bahwa wacana tidak hanya merefleksikan entitas dan relasi sosial, tetapi juga mengkonstruksi atau membentuknya.¹³

¹⁰ Martin van Bruinessen, "Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia," *South East Asia Research* 10, no. 2 (July 2002): 117–54, <https://doi.org/10.5367/000000002101297035>.

¹¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008).

¹² Barbara M. Wildemuth, *Applications of Social Research Methods to Questions in Information and Library Science* (Bloomsbury Publishing USA, 2016); Jane Mills, Ann Bonner, and Karen Francis, "Adopting a Constructivist Approach to Grounded Theory: Implications for Research Design," *International Journal of Nursing Practice* 12, no. 1 (2006): 8–13, <https://doi.org/10.1111/j.1440-172X.2006.00543.x>.

¹³ Michel Foucault, *Archaeology of Knowledge*, 2nd ed. (London: Routledge, 2013), <https://doi.org/10.4324/9780203604168>.

Pendekatan wacana dalam penelitian ini juga mengacu pada teori Norman Fairclough, yang mengidentifikasi tiga aspek konstruktif wacana, yaitu pembentukan identitas sosial (aspek identitas), pembentukan hubungan sosial (aspek relasional), dan pembentukan sistem pengetahuan dan kepercayaan (aspek ideasional).¹⁴ Dengan memahami efek konstruktifnya, perjuangan ideologis dapat dilihat sebagai bagian dari kontestasi wacana yang terus berlangsung. Selain itu, teori Michel Pêcheux mengenai wacana turut digunakan untuk menunjukkan dampak pergulatan ideologis dalam fungsi bahasa serta materialitas linguistik dalam ideologi.¹⁵ Pemikiran Sara Mills juga menjadi rujukan dalam penelitian ini, di mana wacana dipahami sebagai mekanisme yang menyusun makna tentang dunia serta membentuk konsepsi identitas individu dan kolektif dalam suatu masyarakat.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Genealogi Sekularisme di Indonesia (1920-1945): Nasionalisme Jawa (1920-an)

Perdebatan awal mengenai sekularisme di Indonesia telah terjadi sejak dekade 1920-an. Diskursus ini berpusat pada hubungan antara nasionalisme dan Islam, yang sebelum munculnya Budi Utomo dianggap sebagai dua konsep yang saling berkelindan. Namun, pasca berdirinya Budi Utomo, nasionalisme mulai diinterpretasikan dalam kerangka Javanisme.¹⁷

Polemik mengenai nasionalisme Jawa mulai tampak dalam surat kabar *Djawi Hisworo* pada tahun 1918-1919, yang kemudian mengarah pada pembentukan *Committee voor het Javansche Nationalisme* (Panitia Nasionalisme Jawa). Gagasan untuk mengadopsi nasionalisme berbasis budaya Jawa mendapat dukungan dari sejumlah tokoh, seperti Iskak, Sukarno, dan Sutomo.¹⁸ Mereka mengusung ide nasionalisme yang dianggap

¹⁴ Norman Fairclough, "Discourse and Text: Linguistic and Intertextual Analysis within Discourse Analysis," *Discourse & Society* 3, no. 2 (April 1, 1992): 193–217, <https://doi.org/10.1177/0957926592003002004>.

¹⁵ Michel Pêcheux, "O discurso: estrutura ou acontecimento," in *O discurso: estrutura ou acontecimento*, 2008, 68–68, <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-711517>.

¹⁶ Sara Mills, *Discourses of Difference: An Analysis of Women's Travel Writing and Colonialism* (London: Routledge, 2003), <https://doi.org/10.4324/9780203379882>.

¹⁷ Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942*.

¹⁸ Anzar Abdulah, "NATIONALISM, NATION AWARENESS AND PAST IMAGINATION (A REFLECTIONS OF 65 YEAR HISTORY OF INDEPENDENT INDONESIA)," *Historia: Jurnal Pendidikan Dan Peneliti Sejarah* 12, no. 1 (2011): 22–39, <https://doi.org/10.17509/historia.v12i1.12115>; Leo

bertentangan dengan Islam, sehingga mendorong Tjokroaminoto, pemimpin Sarekat Islam (SI), untuk memberikan tanggapan pada tahun 1925. Menurutnyanya:

“Islam sepertujuh bahagian rambut pun tak menghalang dan merintang kejadian dan kemajuan nasionalisme yang sejati tetap memajukan dia. Nasionalisme yang dimajukan oleh Islam bukannya ‘eng’ nasionalisme (yang sempit) dan berbahaya, tetapi ... yang menuntun kepada nasionalisme berdasarkan Islam, yaitu sosialisme yang menghendaki mono-humanisme (persatuan manusia) dikuasai oleh Satu Yang Mahakuasa, Allah S.W.T., dengan lantaran hukum-hukum yang sudah dipermaklumkan kepada utusan-Nya, Nabi Penutup, Muhammad s.a.w.”¹⁹

Pada awalnya, perselisihan antara Panitia Nasionalisme Jawa dan SI bersifat wacana intelektual, tetapi kemudian berkembang menjadi perdebatan dalam ranah keorganisasian. Ketegangan semakin meningkat ketika dalam kongres tahun 1925, Budi Utomo menerima mosi yang menyatakan bahwa pendidikan nasional harus berbasis kebudayaan Jawa. Konflik semakin memanas pada akhir 1925 ketika Jong Java menolak usulan ketuanya, Samsuridjal, untuk memasukkan pelajaran agama Islam dalam program organisasi bagi anggota yang beragama Islam. Padahal, anggota yang beragama Protestan, Katolik, dan Teosofi telah lebih dulu mendapatkan kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan agama mereka masing-masing.²⁰

Ketegangan ini semakin meruncing setelah wawancara Sutomo di *Indische Courant* pada 18 Desember 1926. Dalam wawancara tersebut, Sutomo menyarankan agar pemerintah Hindia Belanda memberikan pangkat istimewa, seperti komisaris polisi dan opsir tentara, kepada kaum terpelajar agar rakyat menaruh kepercayaan kepada mereka. Pernyataan ini memicu kecaman dari SI, yang menilai bahwa Sutomo dan rekan-rekannya hanya berorientasi pada kepentingan pribadi untuk mendapatkan posisi dalam birokrasi kolonial. Sebagai respons, SI mengecam wawancara tersebut, memutuskan hubungan dengan *Surabaya Studie Club* yang dipimpin oleh Sutomo, serta mendisiplinkan anggotanya yang masih terlibat dalam organisasi tersebut. Pada 23 Januari 1927, SI Surabaya secara

Suryadinata, “Indonesian Nationalism and the Pre-War Youth Movement: A Reexamination,” *Journal of Southeast Asian Studies* 9, no. 1 (March 1978): 99–114, <https://doi.org/10.1017/S0022463400009553>.

¹⁹ Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942*.

²⁰ Maj Nygaard-Christensen, “Negotiating Indonesia: Political Genealogies of Timorese Democracy,” *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 14, no. 5 (November 1, 2013): 423–37, <https://doi.org/10.1080/14442213.2013.834958>.

resmi menyatakan kesesuaian dengan keputusan ini.²¹

Bersamaan dengan konflik tersebut, muncul serangan terhadap SI melalui *Majalah Timbul*, yang dipimpin oleh Radjiman Wediyodiningrat dan Singgih, dua tokoh utama nasionalisme Jawa. *Majalah Timbul* menuduh bahwa SI telah dimanipulasi oleh Agus Salim sehingga berubah menjadi "partai pendeta" yang lebih mementingkan Pan-Islam daripada kepentingan nasional. Artikel dalam majalah tersebut menuduh bahwa *Bendera Islam* (majalah milik SI) lebih mengutamakan isu pribadi daripada agenda persatuan bangsa. Meskipun perselisihan ini dimediasi oleh pihak ketiga, hubungan antara nasionalis Jawa dan nasionalis Islam tetap tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.²²

Namun, berbeda dengan hubungan SI dengan Sutomo dan kalangan nasionalis Jawa lainnya, relasi SI dengan *Algemeene Studie Club* Bandung, yang dipimpin oleh Sukarno, justru lebih harmonis. Kedekatan personal antara Sukarno dan Tjokroaminoto menjadi faktor utama yang menjaga hubungan ini. Pada Oktober 1927, Sukarno mengusulkan pembentukan federasi partai politik untuk menyatukan gerakan nasionalis dalam satu wadah koordinatif, yang kemudian melahirkan *Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia* (PPPKI) pada 17 Desember 1927 di Bandung.²³

Namun, hubungan SI dengan PPPKI tidak berlangsung lama. Ketegangan muncul setelah salah satu anggota majelis pertimbangan PPPKI memberikan ucapan selamat kepada Kongres Muhammadiyah di Solo pada 1929, padahal hubungan SI dengan Muhammadiyah saat itu sedang memburuk. Sejak 1927, SI telah menerapkan sanksi disiplin bagi anggotanya yang merangkap keanggotaan dengan Muhammadiyah. SI menilai bahwa PPPKI telah melampaui batas kewenangannya, sehingga menyebabkan ketegangan dalam aliansi tersebut.²⁴

Fenomena menarik dalam perdebatan nasionalisme Islam dan nasionalisme Jawa adalah latar belakang pendidikan para tokoh nasionalisme non-Islam (nasionalisme Jawa). Tokoh-tokoh seperti Sutomo, Singgih, dan Radjiman Wediyodiningrat sejatinya berasal

²¹ Bahtiar Effendy, "Islam and the State in the Indonesian Experience | ICR Journal," October 19, 2020, <https://icrjournal.org/index.php/icr/article/view/684>.

²² Muhamad Afrizal Sholichuddin, Nicky Estu Putu Muchtar, and Rizky Dwi Ratna, "The Relationship of Islam and The State in Contemporary Islamic Political Discourse in Indonesia," *Dirasah International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (October 29, 2023): 78–88, <https://doi.org/10.59373/drs.v1i2.11>.

²³ Carool Kersten, *History of Islam in Indonesia: Unity in Diversity* (Edinburgh University Press, 2017).

²⁴ Carool Kersten, *Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values* (Oxford University Press, 2015).

dari lingkungan Islam, tetapi pendidikan Barat yang mereka tempuh menyebabkan keterasingan mereka dari identitas keislaman. Dalam hal ini, Deliar Noer menyebut kelompok ini sebagai penganut "nasionalisme netral agama." Keadaan serupa juga dialami oleh tokoh seperti Sukarno dan Hatta, yang meskipun masih menjalankan kebiasaan keislaman, lebih memilih menyalurkan aktivisme politik mereka di luar Sarekat Islam.²⁵

Perbedaan ideologis antara nasionalisme Islam dan nasionalisme Jawa mencapai puncaknya dalam debat yang berlangsung di Surabaya pada 9 Januari 1927. Debat tersebut melibatkan Sutomo, Wondosudirdjo, dan Sangadji dari kubu nasionalisme Jawa, serta Agus Salim dari kubu nasionalisme Islam. Dalam debat ini, Sutomo menuduh SI sebagai alat yang dimanfaatkan oleh Agus Salim, yang hanya tertarik pada isu-isu yang tidak berlandaskan realitas dan menyebabkan perpecahan. Sutomo juga menyinggung adanya "orang asing" yang memanfaatkan bendera Islam untuk memecah belah gerakan nasional.²⁶

Perselisihan ini semakin meluas, terutama dalam mendefinisikan makna persatuan. Bagi SI, persatuan hanyalah sarana untuk mencapai tujuan akhir, yaitu kemerdekaan. Sukiman, salah satu tokoh SI, menyatakan bahwa persatuan bukanlah tujuan utama, melainkan sekadar strategi yang dapat berubah sesuai dengan dinamika perjuangan. Perdebatan ini menjadi cikal bakal polemik antara Sukarno dengan tokoh-tokoh Islam seperti Muhammad Natsir, Agus Salim, dan Hassan.

Situasi di atas mencerminkan munculnya kesadaran nasionalisme rakyat di awal abad ke-20. Organisasi pelopor seperti Sarekat Dagang Islam (SDI) dan Budi Utomo menjadi inspirasi bagi lahirnya gerakan-gerakan nasional berikutnya. SI, sebagai kelanjutan dari SDI, menjadi representasi politik Islam, sementara Budi Utomo dan organisasi sejenis mulai mendorong gagasan nasionalisme non-Islam. Sejak Kongres Nasional se-Hindia (All Indie National Congress) pada 1922, konsep nasionalisme

²⁵ Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942*; Ahmad Ali Nuridin, "Revisiting Discourse on Islam and State Relation in Indonesia: The View of Soekarno, Natsir and Nurcholish Madjid," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 6, no. 1 (June 1, 2016): 63–92, <https://doi.org/10.18326/ijims.v6i1.63-92>.

²⁶ Reza Adelia Luthfiana Azizah et al., "The Dynamics of Islam and State Relations in Indonesia," *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization* 5, no. 03 (August 29, 2024): 137–47, <https://doi.org/10.19109/ampera.v5i03.23948>.

Hindia mulai berkembang dan tidak lagi sepenuhnya beridentitas Islam. Dinamika pergerakan nasional pada periode ini menandai lahirnya kesadaran dan perjuangan kolektif untuk kemerdekaan Indonesia.²⁷ Dalam konteks ini, Sukarno menjadi tokoh utama dalam merumuskan gagasan sekularisme, dengan menekankan bahwa negara Indonesia harus berbentuk *nation-state* yang bersifat nasional, bukan negara Islam.

Sekularisme: Wacana dan Kontestasi (1945)

Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pemimpin disibukkan oleh usaha mempersiapkan kemerdekaan itu. Kesibukan itu terlihat dengan terbentuknya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia). Pada hari pertama sidang Lembaga tersebut (29 Mei-1 Juni 1945), atas permintaan ketua sidang Radjiman Wedyodiningrat, para anggota BPUPKI menyampaikan pemikirannya tentang dasar negara yang akan dibentuk. Kesempatan diambil oleh Muhammad Yamin.²⁸ Dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945, ia mengajukan saran dasar negara haruslah berpijak pada nilai-nilai yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri, antara lain peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, maka negara Indonesia haruslah berbentuk negara kebangsaan atau suatu *nationale staat* (negara kebangsaan) yang selaras dengan peradaban Indonesia dan menurut susunan dunia sekeluarga di atas dasar kebangsaan dan ketuhanan.²⁹ Pendapat Yamin ini pun langsung direspons oleh Bagus Hadikusumo, bahwa jika ingin membangun negara yang mempunyai pertahanan dan pembelaan yang kokoh, maka negara Indonesia harus dibangun atas firman-firman Allah atau bersendikan Islam.³⁰ Segera ide negara Islam di atas dijawab oleh Soepomo, yang menurutnya jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran negara (*staatsidee*) yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi individu dan seluruh golongan-

²⁷ Jusuf Wanandi, "Islam in Indonesia: Its History, Development and Future Challenges," *Asia-Pacific Review* 9, no. 2 (November 1, 2002): 104–12, <https://doi.org/10.1080/1343900022000036115>.

²⁸ Bahtiar Effendy, *Islam and the State in Indonesia* (Institute of Southeast Asian Studies, 2003).

²⁹ Saskia Wieringa, "The Birth of the New Order State in Indonesia: Sexual Politics and Nationalism," *Journal of Women's History* 15, no. 1 (2003): 70–91.

³⁰ David M. Bouchier, "Two Decades of Ideological Contestation in Indonesia: From Democratic Cosmopolitanism to Religious Nationalism," *Journal of Contemporary Asia* 49, no. 5 (October 20, 2019): 713–33, <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1590620>.

golongan dalam lapangan apa pun.³¹

Berikutnya, pada 1 Juni 1945, Sukarno mengusulkan lima prinsip dasar negara yang disebutnya sebagai *Pancasila* (kebangsaan, internasionalisme, permusyawaratan, perwakilan, kesejahteraan, dan ketuhanan). Tampaknya Yamin dan Soepomo berkeyakinan bahwa Pancasila sebenarnya digali dari jiwa kepribadian bangsa Indonesia sendiri, oleh karena itu tidak perlu meniru dasar negara lain karena tiap negara memiliki kepribadian yang berbeda. Ketika pidato mengenai Pancasila di atas, terutama saat menjelaskan sila ketiga demokrasi, Sukarno menolak gagasan Islam sebagai dasar bagi negara Indonesia. Menurutnya, meskipun masyarakat Indonesia sekitar 89% beragama Islam, namun sebagian besar darinya tidak terlalu taat dalam menjalankan ajaran Islam, oleh karena itu, mereka lebih cocok dengan negara “sekuler” ketimbang negara Islam. Namun karena rapat mengalami *deadlock* sebagai akibat dari perbedaan ide dasar negara ini, maka Sukarno mengusulkan dibentuknya panitia kecil (Panitia Sembilan). Hasilnya disepakati satu rumusan, antara lain, bahwa Islam tidak dijadikan dasar negara, sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang semula diletakkan di urutan terakhir akhirnya diubah menjadi urutan pertama, dan ditambahi frase yang dikenal dengan tujuh kata, yakni “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”³²

Dari perdebatan itu, dapat diketahui bahwa pereduksian posisi agama dalam mengatur urusan negara pada masa menjelang kemerdekaan berlangsung panjang dan menegangkan antara kelompok nasionalis, yang diwakili oleh Sukarno dan Hatta, dan kelompok Islam, yang diwakili oleh Mas Mansur dan Bagus Hadikusumo. Perdebatan itu kemudian diakhiri dengan kemenangan kelompok nasionalis dengan tercetusnya Pancasila oleh Sukarno pada sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945.³³ Walaupun dalam Pancasila tersebut mengandung “tujuh kata” yang dikenal dengan Piagam Jakarta, namun bisa dikatakan bahwa lahirnya Pancasila menandai lahirnya sekularisme Islam di kalangan kelompok politik yang Sebagian besarnya beragama Islam.³⁴

³¹ Laffan, *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia*.

³² Garth N. Jones, “Soekarno’s Early Views upon the Territorial Boundaries of Indonesia,” *Australian Outlook*, April 1, 1964, <https://doi.org/10.1080/10357716408444160>.

³³ Bernard Johan Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (De Nederlandsche Boek-en Steendr., 1970).

³⁴ Laffan, *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia*; Steven Drakeley, *The History of Indonesia* (Bloomsbury Publishing USA, 2005).

Sidang BPUPKI pertama yang berlangsung pada 29 Mei – 1 Juni 1945 menjadi ajang penyampaian gagasan mengenai dasar negara. Beberapa pemikiran utama dalam sidang ini adalah:

Tokoh	Gagasan Utama
Muhammad Yamin	Mengusulkan dasar negara yang berpijak pada kepribadian bangsa Indonesia, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Konsep ini mengarah pada bentuk negara kebangsaan (<i>nationale staat</i>) yang mengakomodasi aspek ketuhanan dan kebangsaan secara seimbang.
Bagus Hadikusumo	Menekankan bahwa negara Indonesia harus dibangun atas dasar Islam untuk memastikan pertahanan dan pembelaan negara yang kuat.
Soepomo	Mengusulkan konsep negara integralistik yang tidak sekadar berbasis agama tertentu, tetapi mengutamakan kesatuan seluruh rakyat dan mengatasi perbedaan individu maupun golongan.
Sukarno	Pada 1 Juni 1945, mengusulkan konsep Pancasila sebagai dasar negara, yang mencakup kebangsaan, internasionalisme, permusyawaratan, kesejahteraan, dan ketuhanan. Ia menolak gagasan negara Islam dengan alasan mayoritas Muslim di Indonesia tidak secara ketat menjalankan syariat Islam dan lebih cocok dengan konsep negara sekuler.

Sukarno dan Mohammad Hatta sebagai tokoh intelektual muslim berdiri pada posisi yang mewakili kaum nasionalis. Hal ini menunjukkan bahwa kaum muslim seperti Sukarno dan Mohammad Hatta sudah mengenal dan mendukung gagasan sekularisme Islam. Menurut Sri-Edi Swasono, Mohammad Hatta tidak tampil sebagai pendukung dasar Islam, dan oleh karena itu ia tidak dimasukkan sebagai bagian dari “kelompok Islam,” yang telah diwakili oleh Bagus Hadikusumo, Abdul Kahar Muzakkir, Muhammad Natsir, dan Syafruddin Prawiranegara. Karena posisinya itu, Hatta dimasukkan ke dalam “kelompok nasionalis” bersama tokoh-tokoh lain, seperti Sukarno, Soepomo, dan Sjahrir. Sebagian orang mengategorikan Mohammad Hatta sebagai bagian dari aliran nasionalis-religius, dan sebagian lainnya memasukkannya ke dalam nasionalis muslim “sekuler” bersama Sukarno.³⁵ Sesungguhnya di dalam BPUPKI, tidak hanya Mohammad Hatta yang merupakan tokoh intelektual muslim, tetapi juga Sukarno, Soepomo,

³⁵ Sri-Edi Swasono, *Kata Pengantar Religiusitas Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta dalam buku Bung Hatta dan Ekonomi Islam Menangkan makna Maqashid al Syaria'ah* (Jakarta: Kompas, 2010), vii.

Mohammad Yamin, dan Sutan Sjahrir.

Namun sehari setelah Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, pada tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta kembali dipersoalkan. Seorang pejabat angkatan laut Jepang datang ke Hatta dan melaporkan bahwa orang-orang Kristen (yang sebagian besarnya berdomisili di wilayah timur Nusantara) tidak akan bergabung dengan Republik Indonesia kecuali jika beberapa unsur dari Piagam Jakarta dihapuskan. Mereka menyadari penerapan Piagam Jakarta tidak hanya mengancam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan mereka, kerangka konstitusional semacam itu juga akan mengundang diambilnya langkah-langkah yang diskriminatif.³⁶

Karena itu, para pendiri Republik ini dipaksa kembali melakukan tugas melelahkan dalam rangka memodifikasi dasar ideologi dan konstitusi negara. Dalam upaya ini, Hatta menyarankan agar dibuat penyesuaian-penyesuaian tertentu untuk menjamin kesatuan negara nasional Indonesia. Dan karena didorong oleh desakan Hatta, kelompok Islam bersepakat untuk menghapus unsur-unsur legalistik Islam, terutama pencabutan “butir-butir mengenai Islam sebagai agama resmi negara, persyaratan bahwa presiden harus seorang Muslim dan “... kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”³⁷

Beberapa faktor yang menyebabkan penghapusan unsur legalistik Islam dalam dasar negara antara lain:

Faktor	Penjelasan
Persatuan Nasional	Perwakilan dari Indonesia Timur menolak pencantuman syariat Islam karena dianggap diskriminatif terhadap kelompok non-Muslim.
Pragmatisme Politik	Hatta meyakinkan kelompok Islam bahwa penghapusan ini bertujuan menjaga stabilitas politik dan memperkuat persatuan nasional.
Keyakinan terhadap Mayoritas Muslim	Para tokoh Islam percaya bahwa dengan mayoritas Muslim di Indonesia, Islam akan tetap berperan penting dalam kehidupan bernegara tanpa harus menjadi dasar negara secara formal.

³⁶ A. B. Kusuma and R. E. Elson, “A Note on the Sources for the 1945 Constitutional Debates in Indonesia,” January 1, 2011, <https://doi.org/10.1163/22134379-90003589>.

³⁷ B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, 36. Lihat juga Endang Saifuddin Anshari, *The Jakarta Charter 1945*, (Bandung : Rajawali, 1986), 30; Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, 40-41.

Ada beberapa hipotesis mengapa para pemimpin kelompok Islam bisa menerima penghapusan Piagam Jakarta tersebut. *Pertama*, dimasukkannya kata-kata “Yang Maha Esa” dapat dilihat sebagai langkah simbolik untuk menunjukkan kehadiran unsur monoteistik dalam ideologi negara. Dalam hal ini, Wahid Hasjim meyakini bahwa penambahan sifat monoteistik dalam Pancasila, secara prinsip sejalan dengan prinsip tauhid dalam Islam.³⁸ Tampaknya untuk seorang Muslim seperti Hatta cara pemecahan itu telah memberikan pemecahan secara seimbang antara keyakinannya sebagai seorang muslim yang taat dan usahanya untuk mendukung usaha pencapaian kemerdekaan Indonesia.

Kedua, situasi yang berlangsung menyusul diproklamasikannya kemerdekaan mengharuskan para pendiri republik ini untuk bersatu menghadapi masalah-masalah prioritas. Masalah yang paling penting di antaranya adalah upaya pemerintah Belanda yang berusaha menduduki kembali bumi Nusantara. *Ketiga*, didorong rasa kepercayaan diri yang tinggi karena jumlah umat Islam yang mayoritas, para tokoh Islam percaya bahwa lewat pemilihan umum, yang akan diselenggarakan ke depannya, akan memberikan kesempatan secara konstitusional pada mereka untuk menjadikan negara ini negara Islam. Untuk alasan ini, Ki Bagus Hadikusumo atas dukungan Kasman Singodimejo lama kelamaan bersedia menerima usulan-usulan Hatta.³⁹ Termasuk pula Mohammad Natsir ketika menyatakan bahwa karena dimasukkannya prinsip “Percaya kepada Tuhan” ke dalam Pancasila, Indonesia tidak sama sekali menyingkirkan agama dari masalah-masalah kenegaraan.⁴⁰

Dari hasil praktik diskursif melalui berbagai macam ruang publik di atas, pada akhirnya kaum sekularis yang menginginkan pemisahan agama dan negara memiliki sikap bahwa bentuk negara Indonesia haruslah negara kebangsaan, sedangkan dasar negara Indonesia adalah Pancasila dengan syarat sila Ketuhanan Yang Maha Esa haruslah menjadi sila pertama, dan mencoret tujuh kata pada sila pertama tersebut. Pada periode kali ini, Sekularisme Islam di Indonesia digelar dalam ruang publik yang formal, yakni dalam sidang BPUPKI dan PPKI pada periode Mei-Agustus 1945. Kontestasi tersebut

³⁸ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, 41.

³⁹ Bachtiar Effendy, *Islam dan Negara*, 90-91.

⁴⁰ Audrey R. Kahin, *Islam, Nationalism and Democracy: A Political Biography of Mohammad Natsir* (NUS Press, 2012).

dimungkinkan karena adanya pengaruh eksternal, yaitu kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik, yang memaksa Jepang harus meletakkan kekuasaannya di beberapa negara Asia, termasuk Indonesia. Kekalahan Jepang dalam perang tersebut membuat Jepang akhirnya membentuk badan dan komite untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Menariknya, saat sebelum kalah pada perang tersebut, kebijakan Jepang cenderung pro kepada kekuatan Islam.⁴¹ Namun setelah kekalahannya, pemerintah Jepang mengubah arah kebijakan politiknya yang lebih condong mendukung para pemimpin nasionalis untuk memimpin masa depan negara Indonesia dengan cara menyerahkan kepemimpinan Dewan Persatuan (Sanyo Kaigi) dan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) kepada kalangan kaum nasionalis.

Hal ini memberikan peluang politik yang lebih luas kepada kaum kebangsaan untuk mendominasi wacana sekularisme Islam di Indonesia. Hal ini dapat ditunjukkan komposisi jumlah keanggotaan BPUPKI. Komposisi keanggotaan BPUPKI yang diumumkan pada 29 April 1945 terdiri dari 62 orang anggota pada seri persidangan pertama (29 Mei-1 Juni), dan hanya terdapat 10 wakil golongan Islam (Agus Salim, Abikusno Tjokrosuyoso, Sukiman Wirjosandjojo, Mas Mansjur, Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Halim, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Sanusi, Wachid Hasjim, dan Masjkur).⁴² Sisanya, 52 orang, tersebut adalah orang-orang yang terdiri dari kaum Islam yang beraliran nasionalis sekular, dan beberapa orang dari perwakilan non-muslim. Dominannya para politisi sekuler dalam Panitia ini mencerminkan preferensi pihak Jepang untuk menyerahkan kedaulatan negara kepada orang-orang Indonesia yang menurut mereka sanggup memerintah negara modern.⁴³

Kedua, dalam konteks ini juga, Benda berpendapat bahwa elite nasional sekuler mendapatkan keuntungan karena superioritasnya dalam pendidikan Barat dan pembelajaran politik yang “bisa secara tepat disebut sebagai keunggulan yang bersifat

⁴¹ Minako Sakai and Amelia Fauzia, “Islamic Orientations in Contemporary Indonesia: Islamism on the Rise?,” *Asian Ethnicity* 15, no. 1 (January 2, 2014): 41–61, <https://doi.org/10.1080/14631369.2013.784513>.

⁴² Idris Thaha, Ismatu Ropi, and Saiful Umam, “Religion and the Identity of Independent Indonesia: A Study on Religious Narratives According to the Founding Fathers,” *Ulumuna* 28, no. 2 (December 31, 2024): 881–910, <https://doi.org/10.20414/ujis.v28i2.916>.

⁴³ Yudi Latif, *Intelegensi Muslim dan Kuasa Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke 20* (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), 335.

monopoli di antara para pesaingnya.”⁴⁴ *Ketiga*, pada hari penutupan (1 Juni), Sukarno, sebagai seorang pemimpin nasionalis terkemuka, menyampaikan sebuah pidato yang untuk pertama kalinya menguraikan idenya tentang Pancasila (nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan).⁴⁵ *Keempat*, peluang lainnya bersumber dari kharisma kepribadian dan ketrampilan orasi seorang Sukarno, yang mampu menghadirkan harapan dan optimisme akan hari yang lebih baik bagi bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan. Dengan kekuatan kharismanya, mampu memberi pengaruh kuat pula kepada anggota sidang bahwa usulan dasar negara yang disampaikan Sukarno lebih sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia yang majemuk.

Arkeologi Wacana Nasionalisme, Islam, dan Sekularisme di Indonesia: Kontestasi Makna dalam Pembentukan Dasar Negara

Wacana tentang nasionalisme, Islam, dan sekularisme dalam pembentukan dasar negara Indonesia dapat dianalisis melalui perspektif arkeologi pengetahuan Michel Foucault. Sebagaimana dikemukakan dalam *Archeology of Knowledge*, wacana tidak sekadar merefleksikan entitas sosial dan relasi kuasa, tetapi juga berperan aktif dalam membentuknya.⁴⁶ Dalam konteks ini, nasionalisme, Islam, dan sekularisme tidak hanya menjadi gagasan yang beroperasi dalam ruang perdebatan politik, tetapi juga merupakan konstruksi historis yang diproduksi melalui praktik diskursif.

Norman Fairclough mengidentifikasi tiga aspek utama dalam konstruksi wacana: aspek identitas (pembentukan identitas sosial), aspek relasional (pembentukan relasi sosial), dan aspek ideasional (pembentukan sistem pengetahuan dan kepercayaan). Dalam kontestasi nasionalisme, Islam, dan sekularisme di Indonesia, ketiga aspek ini terlihat dalam bagaimana gagasan tentang negara bangsa, bentuk pemerintahan republik, dan hubungan antara agama dan negara diperdebatkan oleh para tokoh nasional.⁴⁷

Para pemikir nasionalis seperti Sukarno, Hatta, Yamin, dan Soepomo mengembangkan wacana negara bangsa yang berlandaskan persatuan dan kesatuan. Mereka merespons perkembangan global pada awal abad ke-20, khususnya munculnya

⁴⁴ Harry J. Benda, *The Crescent and The Rising Sun*, 173-174.

⁴⁵ C. Van Dijk, *Rebellion Under the Banner of Islam*, 45-46.

⁴⁶ Foucault, *Archeology of Knowledge*.

⁴⁷ Howard M. Federspiel, *Indonesian Muslim Intellectuals of the 20th Century* (Institute of Southeast Asian Studies, 2006).

model *nation-state* yang pertama kali dipraktikkan oleh Turki di bawah Mustafa Kemal Atatürk. Dalam konteks Indonesia, model ini diterapkan dengan menekankan semangat kebangsaan yang melampaui identitas agama maupun etnis. Namun, konsep ini mendapat tantangan dari kelompok Islam yang menghendaki negara Islam berbasis syariat.⁴⁸

Mohammad Natsir, misalnya, berargumen bahwa nasionalisme Indonesia harus bercorak Islami karena Islamlah yang pertama kali membentuk identitas nasional melalui organisasi seperti Sarekat Islam (SI). Dalam pandangannya, Islam tidak hanya menjadi faktor pemersatu bangsa tetapi juga harus menjadi dasar dalam sistem hukum negara. Ia menegaskan bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk menegakkan hukum Islam di Indonesia.⁴⁹

Pertarungan wacana ini menciptakan ketegangan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis-sekuler. Pendukung sekularisme seperti Sukarno, Hatta, dan Soepomo mempertanyakan apakah negara berbasis Islam dapat mengakomodasi pluralisme Indonesia. Mereka khawatir bahwa agama akan dijadikan alat kekuasaan dan bahwa interpretasi hukum Islam yang beragam dapat memicu konflik internal di kalangan umat Islam sendiri. Sukarno, misalnya, berpendapat bahwa hukum Islam harus fleksibel agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, dan bahwa negara harus didasarkan pada nilai-nilai substansial Islam, bukan sekadar formalisme hukum Islam.⁵⁰

Dalam praktik diskursifnya, sekularisme Islam di Indonesia bukan hanya soal pemisahan agama dan negara, tetapi juga melahirkan berbagai konsekuensi politik dan hukum. Misalnya, perdebatan tentang peradilan Islam menjadi salah satu isu krusial. Tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo dan Wahid Hasjim menginginkan peradilan Islam sebagai bagian dari sistem hukum negara, sementara Sartono menolak gagasan tersebut dengan alasan bahwa hukum negara harus bersifat universal dan tidak berbasis agama tertentu. Muhammad Hatta bahkan berargumen bahwa Al-Qur'an tidak dapat dijadikan kitab hukum negara karena merupakan kitab agama yang bersifat spiritual.⁵¹

⁴⁸ Sutomo and Budihardjo, "The Rejection of Religious Nationalism towards the Secular State and the Islamic Caliphate."

⁴⁹ Kahin, *Islam, Nationalism and Democracy*.

⁵⁰ Elson, "Nationalism, Islam, 'Secularism' and the State in Contemporary Indonesia."

⁵¹ Van Der Kroef, "The Role of Islam in Indonesian Nationalism and Politics."

Perdebatan mengenai Islam dan dasar negara semakin intensif ketika kelompok Islam mempertahankan Piagam Jakarta, yang mencantumkan kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan syariat Islam. Tokoh seperti Wachid Hasjim menegaskan bahwa hanya umat Islam yang boleh menjadi presiden dan wakil presiden, sedangkan Ki Bagus Hadikusumo menuntut agar sila pertama dalam Pancasila tetap mencantumkan frasa *“dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”* Namun, kelompok sekuler, termasuk Latuharhary dan Djajadiningrat, menolak kompromi ini karena khawatir akan diskriminasi terhadap pemeluk agama lain dan meningkatnya fanatisme agama dalam politik negara.⁵²

Akhirnya, perdebatan ini mencapai titik kompromi ketika Sukarno mengusulkan agar semua pihak mengorbankan sebagian aspirasinya demi kesatuan bangsa. Piagam Jakarta mengalami revisi, dan sila pertama Pancasila dirumuskan sebagai *“Ketuhanan Yang Maha Esa”*, yang lebih inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Keputusan ini menunjukkan bagaimana nasionalisme, Islam, dan sekularisme di Indonesia bukan hanya beroperasi sebagai ideologi yang terpisah, tetapi saling bertarung dalam ranah diskursif untuk membentuk dasar negara yang kita kenal saat ini.⁵³

KESIMPULAN

Penelitian menemukan bahawa perdebatan mengenai nasionalisme, Islam, dan dasar negara dalam konteks Indonesia menunjukkan dinamika diskursif yang kompleks, di mana sekularisme Islam berperan dalam membentuk konstruksi kebangsaan. Wacana sekularisme tidak hanya berkaitan dengan pemisahan agama dan negara, tetapi juga menjadi arena kontestasi ideologis antara kelompok nasionalis-sekuler dan kelompok Islamis. Pemikiran tokoh-tokoh nasional seperti Sukarno, Hatta, Yamin, dan Soepomo mencerminkan orientasi negara bangsa yang berlandaskan pada prinsip kebersamaan dan persatuan dalam keberagaman. Sementara itu, tokoh-tokoh Islamis seperti Natsir dan Ki Bagus Hadikusumo menekankan pentingnya peran Islam dalam membentuk karakter nasionalisme Indonesia.

⁵² Assyaukanie, *Islam and the Secular State in Indonesia*.

⁵³ Porter, *Managing Politics and Islam in Indonesia*.

Diskursus ini memperlihatkan bahwa sekularisme di Indonesia tidak dapat dipahami secara mutlak sebagai pemisahan total agama dari negara, melainkan sebagai suatu kompromi politik dan ideologis untuk menjaga harmoni sosial dalam masyarakat yang multikultural dan multiagama. Perdebatan antara kelompok yang menghendaki negara berbasis Islam dan kelompok yang mengusung konsep negara sekuler mengarah pada lahirnya konsensus nasional yang termanifestasi dalam Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, pengalaman Indonesia dalam menyikapi sekularisme dan nasionalisme mencerminkan model hibrida yang khas, di mana nilai-nilai agama tetap menjadi bagian dari kehidupan bernegara tanpa harus mendominasi sistem politik secara eksklusif. Model ini menunjukkan bahwa sekularisme dalam konteks Indonesia lebih bersifat inklusif dan akomodatif, memungkinkan adanya ruang bagi ekspresi keagamaan dalam ranah publik, sekaligus menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan kebangsaan.

REFERENSI

- Abdulah, Anzar. "Nationalism, Nation Awareness And Past Imagination (A Reflections Of 65 Year History Of Independent Indonesia)." *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah* 12, no. 1 (2011): 22–39. <https://doi.org/10.17509/historia.v12i1.12115>.
- Assyaukanie, Luthfi. *Islam and the Secular State in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies, 2009.
- Azizah, Reza Adelia Luthfiana, Zulfi Mubaraq, M. Lutfi Mustofa, and Moh Toriquddin. "The Dynamics of Islam and State Relations in Indonesia." *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization* 5, no. 03 (August 29, 2024): 137–47. <https://doi.org/10.19109/ampera.v5i03.23948>.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan ulama: Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII & XVIII: akar pembaruan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Barton, Greg. "Indonesia: Legitimacy, Secular Democracy, and Islam." *Politics & Policy* 38, no. 3 (2010): 471–96. <https://doi.org/10.1111/j.1747-1346.2010.00244.x>.
- Boland, Bernard Johan. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. De Nederlandsche Boek-en Steendr., 1970.
- Bourchier, David M. "Two Decades of Ideological Contestation in Indonesia: From Democratic Cosmopolitanism to Religious Nationalism." *Journal of Contemporary Asia* 49, no. 5 (October 20, 2019): 713–33. <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1590620>.
- Bruinessen, Martin van. "Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia." *South East Asia Research* 10, no. 2 (July 2002): 117–54. <https://doi.org/10.5367/000000002101297035>.
- Drakeley, Steven. *The History of Indonesia*. Bloomsbury Publishing USA, 2005.
- Effendy, Bahtiar. *Islam and the State in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies, 2003.

- . “Islam and the State in the Indonesian Experience | ICR Journal,” October 19, 2020. <https://icrjournal.org/index.php/icr/article/view/684>.
- Elson, R.E. “Nationalism, Islam, ‘Secularism’ and the State in Contemporary Indonesia.” *Australian Journal of International Affairs* 64, no. 3 (June 1, 2010): 328–43. <https://doi.org/10.1080/10357711003736493>.
- Fairclough, Norman. “Discourse and Text: Linguistic and Intertextual Analysis within Discourse Analysis.” *Discourse & Society* 3, no. 2 (April 1, 1992): 193–217. <https://doi.org/10.1177/0957926592003002004>.
- Federspiel, Howard M. *Indonesian Muslim Intellectuals of the 20th Century*. Institute of Southeast Asian Studies, 2006.
- Foucault, Michel. *Archaeology of Knowledge*. 2nd ed. London: Routledge, 2013. <https://doi.org/10.4324/9780203604168>.
- Jones, Garth N. “Soekarno’s Early Views upon the Territorial Boundaries of Indonesia.” *Australian Outlook*, April 1, 1964. <https://doi.org/10.1080/10357716408444160>.
- Kahin, Audrey R. *Islam, Nationalism and Democracy: A Political Biography of Mohammad Natsir*. NUS Press, 2012.
- Kersten, Carol. *History of Islam in Indonesia: Unity in Diversity*. Edinburgh University Press, 2017.
- . *Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values*. Oxford University Press, 2015.
- Kusuma, A. B., and R. E. Elson. “A Note on the Sources for the 1945 Constitutional Debates in Indonesia,” January 1, 2011. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003589>.
- Laffan, Michael Francis. *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma Below the Winds*. London: Routledge, 2003. <https://doi.org/10.4324/9780203222577>.
- Liddle, R. William. “The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation.” *The Journal of Asian Studies* 55, no. 3 (August 1996): 613–34. <https://doi.org/10.2307/2646448>.
- Mills, Jane, Ann Bonner, and Karen Francis. “Adopting a Constructivist Approach to Grounded Theory: Implications for Research Design.” *International Journal of Nursing Practice* 12, no. 1 (2006): 8–13. <https://doi.org/10.1111/j.1440-172X.2006.00543.x>.
- Mills, Sara. *Discourses of Difference: An Analysis of Women’s Travel Writing and Colonialism*. London: Routledge, 2003. <https://doi.org/10.4324/9780203379882>.
- Noer, Deliar. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942*. Oxford University Press, 1973.
- Nurdin, Ahmad Ali. “Revisiting Discourse on Islam and State Relation in Indonesia: The View of Soekarno, Natsir and Nurcholish Madjid.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 6, no. 1 (June 1, 2016): 63–92. <https://doi.org/10.18326/ijims.v6i1.63-92>.
- Nygaard-Christensen, Maj. “Negotiating Indonesia: Political Genealogies of Timorese Democracy.” *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 14, no. 5 (November 1, 2013): 423–37. <https://doi.org/10.1080/14442213.2013.834958>.
- Pêcheux, Michel. “O discurso: estrutura ou acontecimento.” In *O discurso: estrutura ou acontecimento*, 68–68, 2008. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-711517>.

- Picard, Michel, and Rémy Madinier. *The Politics of Religion in Indonesia: Syncretism, Orthodoxy, and Religious Contention in Java and Bali*. Routledge, 2011.
- Porter, Donald. *Managing Politics and Islam in Indonesia*. London: Routledge, 2002. <https://doi.org/10.4324/9780203642764>.
- Raillon, François. “The Return of Pancasila: Secular vs. Islamic Norms, Another Look at the Struggle for State Dominance in Indonesia.” In *The Politics of Religion in Indonesia*. Routledge, 2011.
- Sakai, Minako, and Amelia and Fauzia. “Islamic Orientations in Contemporary Indonesia: Islamism on the Rise?” *Asian Ethnicity* 15, no. 1 (January 2, 2014): 41–61. <https://doi.org/10.1080/14631369.2013.784513>.
- Salim, Arskal. *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. University of Hawaii Press, 2008.
- Seo, Myengkyo. “Defining ‘Religious’ in Indonesia: Toward Neither an Islamic nor a Secular State.” *Citizenship Studies* 16, no. 8 (December 1, 2012): 1045–58. <https://doi.org/10.1080/13621025.2012.735028>.
- Sholichuddin, Muhamad Afrizal, Nicky Estu Putu Muchtar, and Rizky Dwi Ratna. “The Relationship of Islam and The State in Contemporary Islamic Political Discourse in Indonesia.” *Dirasab International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (October 29, 2023): 78–88. <https://doi.org/10.59373/drs.v1i2.11>.
- Suryadinata, Leo. “Indonesian Nationalism and the Pre-War Youth Movement: A Reexamination.” *Journal of Southeast Asian Studies* 9, no. 1 (March 1978): 99–114. <https://doi.org/10.1017/S0022463400009553>.
- Sutomo, Imam, and Budihardjo Budihardjo. “The Rejection of Religious Nationalism towards the Secular State and the Islamic Caliphate: Indonesian Religious Figures Perspective.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 1 (June 21, 2021): 115–37. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i1.115-137>.
- Thaha, Idris, Ismatu Ropi, and Saiful Umam. “Religion and the Identity of Independent Indonesia: A Study on Religious Narratives According to the Founding Fathers.” *Ulumuna* 28, no. 2 (December 31, 2024): 881–910. <https://doi.org/10.20414/ujs.v28i2.916>.
- Van Der Kroef, Justus M. “The Role of Islam in Indonesian Nationalism and Politics.” *Western Political Quarterly* 11, no. 1 (March 1, 1958): 33–54. <https://doi.org/10.1177/106591295801100103>.
- Wanandi, Jusuf. “Islam in Indonesia: Its History, Development and Future Challenges.” *Asia-Pacific Review* 9, no. 2 (November 1, 2002): 104–12. <https://doi.org/10.1080/1343900022000036115>.
- Wieringa, Saskia. “The Birth of the New Order State in Indonesia: Sexual Politics and Nationalism.” *Journal of Women’s History* 15, no. 1 (2003): 70–91.
- Wildemuth, Barbara M. *Applications of Social Research Methods to Questions in Information and Library Science*. Bloomsbury Publishing USA, 2016.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).